

## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Adapun data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar dari pada angka. Dengan menggunakan metode penelitian ini dimungkinkan untuk masing-masing pertanyaan mampu dalam menjangkau data dan dilakukan analisis serta interpretasi.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (*action research*) yang bermaksud secara intensif turut memperbaiki tata kelola administrasi pemerintah desa yang sedang berjalan. *Action research* atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dalam penelitian tindakan peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Penelitian tindakan ditujukan untuk memberikan andil pada pemecahan masalah praktis dalam situasi problematik yang mendesak. Disamping itu, penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu lebih kepada penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) dalam

artian suatu penelitian yang lebih memprioritaskan pada gambaran kejadian-kejadian yang ada yang berlangsung pada saat ini,

#### **4.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana peneliti bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini sedang menempuh program tugas belajar dari beasiswa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Universitas Brawijaya. Adapun yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Makarti Jaya Kecamatan Pangkalan Lada dimana peneliti pernah bertugas sebagai PJS. Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan serta pernah bertugas di Kecamatan Pangkalan Lada selama 4 (empat) Tahun (2007 s/d 2011) sebagai Kepala Seksi Pemerintahan (Eselon IV a) langsung dibawah komando Camat Pangkalan Lada yang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya adalah menangani secara khusus berbagai macam urusan yang terkait dengan pembinaan tata kelola pemerintahan desa.

Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukotakan Pangkalan Bun terdiri dari 6 (enam) kecamatan yang terbagi menjadi desa dan kelurahan dengan total keseluruhan 81 desa dan 13 kelurahan. Sebagai gambaran kondisi pemerintahan desa dari total 81 desa tersebut diatas masih relatif sama dalam hal tata kelola administrasi desa yakni masih menggunakan metode manual dalam penatakelolaan administrasi desa. Belum ada satupun desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah menerapkan administrasi desa secara elektronik (*electronic administration*). Dari total 81 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi populasi dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Makarti Jaya

yang terletak di Kecamatan Pangkalan Lada sebagai sampel dan lokasi dalam kegiatan penelitian ini. Pemilihan sampel ini tentunya sangat beralasan, karena semua desa yang ada memiliki sistem tata kelola administrasi yang seragam dan pola kerja yang relatif sama.

#### 4.3 Sumber Data

Dalam hal ini Arikonto membagi data menjadi tiga kelompok besar yang pertama yaitu *person* atau sumber data yang berupa orang yang memiliki kompetensi terhadap masalah yang diteliti, yang kedua yaitu *place* atau tempat dan alat yang digunakan dalam penelitian, atau kinerja dan aktifitas yang ada di dalamnya dan yang ketiga yaitu *paper* atau data yang bersumber dari dokumen. Adapun berdasarkan tingkatan sumber data, dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi data primer dan data sekunder sebagai berikut :

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan pada objek penelitian. Peneliti turun langsung ke objek penelitian untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan beberapa informan. Adapun yang termasuk dalam katagori data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil kegiatan wawancara dengan para pihak yang peneliti anggap sebagai *key person* yang dapat memberikan data dan informasi akurat karena narasumber merupakan pelaku langsung dalam tata kelola serta pembinaan administrasi desa. Diantara data primer dalam hal ini adalah Kepala Desa Makarti Jaya, Sekretaris Desa Makarti Jaya, masing-masing Kepala Urusan Desa Makarti Jaya, Camat Pangkalan Lada, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 2. Data Sekunder

Disamping mengumpulkan data primer, peneliti juga mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data dan informasi dengan melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Sumber informasi yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, koran, dan sumber informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Data sekunder dalam hal ini diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang administrasi desa, dokumen-dokumen berbagai jenis administrasi desa, arsip-arsip administrasi desa dan pelayanan publik, maupun lainnya yang berkaitan dengan tata kelola administrasi pemerintah desa di Desa Makarti Jaya.

### 4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu :

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden secara langsung, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka secara langsung.

Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2) Camat Pangkalan Lada

- 3) Kepala Desa Makarti Jaya
- 4) Sekretaris Desa Makarti Jaya
- 5) Kepala Urusan Desa Makarti Jaya
- 6) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 7) Masyarakat Desa Makarti Jaya sebagai user pelayanan desa

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat kegiatan wawancara berlangsung.

Pedoman wawancara secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1) Kelemahan administrasi desa saat ini (cara manual)
- 2) Pemahaman tentang *electronic administration*
- 3) Kebijakan terkait kesiapan *electronic administration*
- 4) Dukungan anggaran *electronic administration*
- 5) Instrumen yang disiapkan untuk *electronic administration*
- 6) Kesiapan implementasi *electronic administration*
- 7) Hambatan dan kendala *electronic administration*
- 8) Strategi yang mendukung penerapan *electronic administration*

Adapun materi-materi pertanyaan yang secara terperinci dan detail yang akan digunakan sebagai pedoman saat melakukan kegiatan wawancara pada masing-masing sumber adalah sebagai berikut :

1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

- a. Dalam tata kelola Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam bidang apa saja *electronic government* sudah diterapkan ?
- b. Bagaimana perkembangan tata kelola administrasi desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat ?
- c. Seberapa intens pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada pemerintah desa di wilayahnya dalam pengelolaan administrasi desa ?
- d. Program dan kegiatan apa saja yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi desa ?
- e. Apakah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pernah memikirkan mengagendakan program *e government* masuk ke dalam pemerintahan desa ? dalam hal apa saja ?
- f. Pernahkan direncanakan atau diagendakan program untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa secara manual menjadi pengelolaan administrasi desa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam hal ini dikelola berbasis aplikasi pada komputer ?

- g. Seberapa jauh pemahaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pengelolaan administrasi desa elektronik baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya ?
- h. Adakah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah dirancang /diagendakan atau dibuat untuk program administrasi desa elektronik dimaksud ?
- i. Tersediakah anggaran pada APBD Kotawaringin Barat untuk mewujudkan program administrasi desa elektronik dimaksud ?
- j. Apa saja proses kebijakan yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa elektronik ?
- k. Unit satuan kerja mana yang paling cocok untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator fasilitator tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan program administrasi desa elektronik ?
- l. Seberapa jauh kesiapan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa secara elektronik (Aplikasi Simpul Desa) ?
- m. Apabila penyelenggaraan adminitrasi desa ini terwujud, hal-hal apa saja yang perlu di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kedepannya ?

## 2) Camat Pangkalan Lada

- a. Apakah Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada pernah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait program *electronic government* masuk ke level pemerintahan desa? dalam hal apa saja?

- b. Pernahkan direncanakan atau diagendakan program untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa secara manual menjadi pengelolaan administrasi desa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam hal ini dikelola berbasis aplikasi pada komputer ?
- c. Seberapa intens pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan pada pemerintah desa di wilayahnya dalam pengelolaan administrasi desa ?
- d. Program dan kegiatan apa saja yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada pada pemerintah desa di wilayahnya dalam pembinaan administrasi di desa ?
- e. Seberapa jauh pemahaman Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada terhadap pengelolaan administrasi desa elektronik baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya ?
- f. Apa saja proses kebijakan yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa elektronik ?
- g. Unit satuan kerja mana yang paling cocok untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator pendamping tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan program administrasi desa elektronik ?
- h. Seberapa jauh kesiapan pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa secara elektronik (Aplikasi Simpul Desa) ?
- i. Apabila penyelenggaraan administrasi desa ini terwujud, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada kedepannya ?



3) Kepala Desa Makarti Jaya

- a. Dalam tata kelola Pemerintahan Desa Makarti Jaya, dalam bidang apa saja *electronic government* sudah diterapkan ?
- b. Seberapa intens pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Pemerintah Kecamatan Pangkalan Lada dalam hal pengelolaan administrasi desa ?
- c. Program dan kegiatan apa saja yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa di Desa Makarti Jaya ?
- d. Apakah Pemerintah Desa Makarti Jaya pernah berinisiatif mengusulkan atau melakukan terobosan sendiri mengagendakan program *e government* masuk ke pemerintahan desa? dalam hal apa saja?
- e. Apa saja kendala yang dihadapi saat ini terkait pengelolaan administrasi desa secara manual ?
- f. Pernahkan diusulkan atau diagendakan program untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa secara manual menjadi pengelolaan administrasi desa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam hal ini dikelola berbasis aplikasi pada komputer ?
- g. Seberapa jauh pemahaman Pemerintah Desa Makarti Jaya terhadap pengelolaan administrasi desa elektronik baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya ?

- h. Adakah regulasi berupa peraturan desa atau bentuk lainnya yang telah dirancang atau dibuat untuk program administrasi desa elektronik dimaksud ?
- i. Tersediakah anggaran APBDes/ ADD untuk mewujudkan program administrasi desa elektronik dimaksud ?
- j. Sarana dan prasarana apa yang telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan program administrasi desa elektronik ?
- k. Apa saja proses kebijakan yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa elektronik ?
- l. Sejauh mana kecakapan aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer dll)?
- m. Seberapa jauh kesiapan Pemerintah Desa Makarti Jaya dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi desa secara elektronik (Aplikasi Simpul Desa)?
- n. Apabila penyelenggaraan adminitrasi desa ini terwujud, hal-hal apa saja yang perlu di lakukan oleh Pemerintah Desa Makarti Jaya kedepannya?

#### 4) Sekretaris Desa Makarti Jaya

- a. Apa saja kendala yang dihadapi saat ini terkait pengelolaan administrasi desa secara manual ?
- b. Seberapa jauh pemahaman sekretaris desa terhadap pengelolaan administrasi desa secara elektronik baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya ?

- c. Sejauh mana kecakapan aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer dll) ?

5) Kepala Urusan Desa Makarti Jaya

- a. Apa saja kendala yang dihadapi saat ini terkait pengelolaan administrasi desa secara manual ?
- b. Seberapa jauh pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan administrasi desa secara elektronik baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya ?
- c. Sejauh mana kecakapan aparatur desa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer dll) ?

6) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Bagaimana kualitas dari tata kelola administrasi desa di Desa Makarti Jaya ?
- b. Bagaimana kualitas pelayanan publik di Desa Makarti Jaya ?
- c. Apakah terdapat kekurangan dan kelemahan dalam tata kelola administrasi desa dan pelayanan publik selama ini ?
- d. Apa saja saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa ?
- e. Seberapa jauh pemahaman Anggota BPD terhadap pengelolaan administrasi desa secara elektronik baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya ?
- f. Apa saja peran serta BPD apabila program administrasi desa elektronik ini terwujud ?

7) Masyarakat Desa Makarti Jaya sebagai user pelayanan desa

- a. Bagaimana kualitas dari tata kelola administrasi desa di Desa Makarti Jaya ?
- b. Bagaimana kualitas pelayanan publik di Desa Makarti Jaya ?
- c. Apakah terdapat kekurangan dan kelemahan dalam tata kelola administrasi desa dan pelayanan publik selama ini ?
- d. Apa saja saran dan kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi desa ?
- e. Seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan administrasi desa secara elektronik baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya ?
- f. Apa saja peran serta masyarakat apabila program administrasi desa elektronik ini terwujud ?

2) Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Adapun yang menjadi obyek untuk dilakukan observasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Situasi dan kondisi arsip surat menyurat pemerintah desa
- 2) Situasi dan kondisi pelayanan administrasi desa

- 3) Situasi dan kondisi tata kelola berbagai jenis administrasi desa
- 4) Situasi dan kondisi perangkat pendukung *electronic administration*
- 5) Situasi dan kondisi kesiapan perangkat desa dalam menghadapi *electronic administration*

### 3) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa :

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang administrasi pemerintah desa :  
(peraturan menteri dalam negeri, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan desa dan lain lain.
- 2) Arsip tentang surat-menyurat di desa yang terkait dengan tata kelola administrasi desa manual.
- 3) Arsip dokumentasi desa terkait tata kelola administrasi desa secara manual.
- 4) Data monografi desa

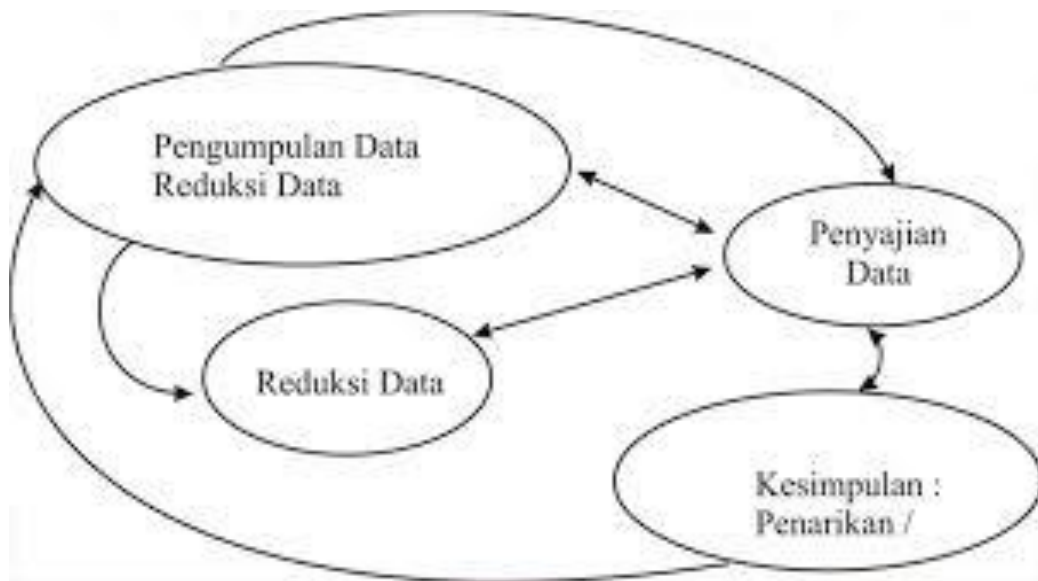
## 4.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2007) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun siklus dari

keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan dalam skema berikut :

Gambar 4.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif

(Miles dan Huberman, 2007:20)



Siklus Proses Analisis Data

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.

### 3.6 Keabsahan dan Keajegan Penelitian

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependentbility*), dan obyektivitas (*confirmability*). Hal ini sesuai pendapat Sugiyono (2009:366) yang menyatakan bahwa uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas

eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*).

1. Uji validitas internal (*credibility*)

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

2. Validitas Eksternal (*transferability*)

Uji validitas eksternal dilaksanakan apakah hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks (*setting*) tertentu dapat ditransfer ke subyek lain yang memiliki tipologi yang sama. Validitas eksternal sebagai persoalan empiris bergantung kepada kebersamaan antara konteks pengiring dan penerima.

3. Reliabilitas (*dependability*).

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah si peneliti sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya.

4. Obyektivitas (*confirmability*)

Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :



a. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.